



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 10 Mei 2025

Halaman: 2

PERHOTELAN 17 Ribu Penginapan Ilegal Bikin PAD Bocor

JOGJA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ resah dengan banyaknya penginapan ilegal yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Keberadaan mereka selain menurunkan jumlah okupansi hotel resmi, juga menjadi sumber kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). "Target (okupansi) sulit dikejar. Pemprov harus mengambil langkah untuk menindak penginapan ilegal," ujar Ketua PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono saat dikonfirmasi, Rabu (7/5).

Menurutnya, penginapan ilegal yang dimaksud adalah penginapan yang tidak mengurus izin dan membayar pajak kepada pemerintah daerah. Padahal, membiarkan hal tersebut sama dengan menghambat kenaikan PAD. "Kami *nggak bisa ngapa-ngapain*, itu juga suatu kebocoran PAD," tuturnya.

Selain kebijakan efisiensi anggaran, sulitnya menjejat target okupansi hotel juga dipengaruhi oleh maraknya penginapan ilegal. Banyak wisatawan lebih memilih menginap di tempat-tempat tersebut karena tarifnya jauh lebih murah. Penginapan ilegal dapat dengan leluasa menawarkan harga rendah karena tidak menanggung beban biaya operasional seperti hotel resmi. Selain itu, mereka tidak dikenakan pajak dan retribusi daerah, sehingga konsumen pun tidak perlu membayar pajak tambahan seperti pajak hotel dan pelayanan.

"Kalau kami *kan* harus ada sertifikat laik fungsi (SLF), sertifikasi dari hotelnya, sertifikat sumber daya manusia (SDM) dan sebagainya," terangnya.

Sejak 2023, pihaknya terus mendesak pemerintah daerah agar segera menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menilai tanggapan dari Pemkot Jogja Hasto Wardoyo cukup baik. Penginapan yang belum tergabung ke PHRI disarankan segera bergabung. Hal itu karena, anggota PHRI DIJ otomatis telah mengantongi izin beserta pajak ke pemerintah. "Khawatirnya seperti *hospitality* (kurang baik), kalau ada apa-apa nanti citra Jogja yang tercoreng, ujungnya PHRI yang kena," keluhnya.

Terkait *hospitality* itu di antaranya jaminan pelayanan yang baik, kecelakaan dan sebagainya. PHRI DIJ telah mencatat, terdapat sekitar 17 ribu penginapan yang ilegal di DIJ. Data tersebut termasuk rumah yang disewakan dan indeksos. (*oso/wia/rg*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Negatif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005